

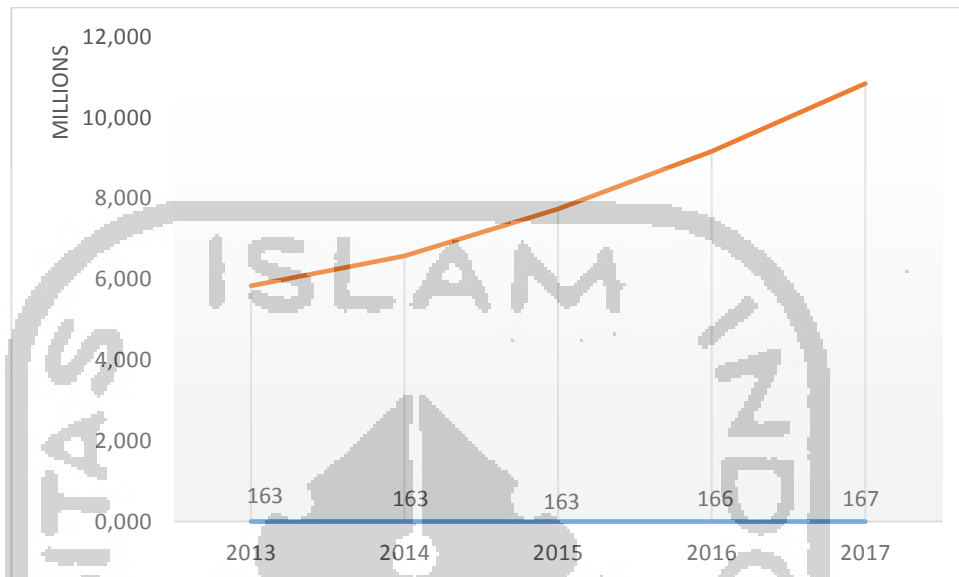
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi syariah belakangan ini sedang populer bukan hanya di negara negara Islam tapi juga di negara negara barat, keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem yang ada di dalam ekonomi Islam diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Peningkatan yang terjadi dalam ekonomi Islam ini mempunyai tujuan dan fungsi terhadap perbankan syariah dalam perekonomian yaitu memajukan kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan dsitribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif (Akhtar, 2011).

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sedangkan pada perbankan Syariah, BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kehadiran (BPRS) di Indonesia semakin menambah jumlah perbankan syariah, sebagaimana dinyatakan oleh Husaeni (2017) menyebutkan bahwa BPRS dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksinya pembiayaan yang tidak berbasis riba. Sampai dengan juni 2016, jumlah BPRS di Indonesia mencapai 165 dengan jumlah 428 dan jumlah pekerja mencapai 4,495 orang.



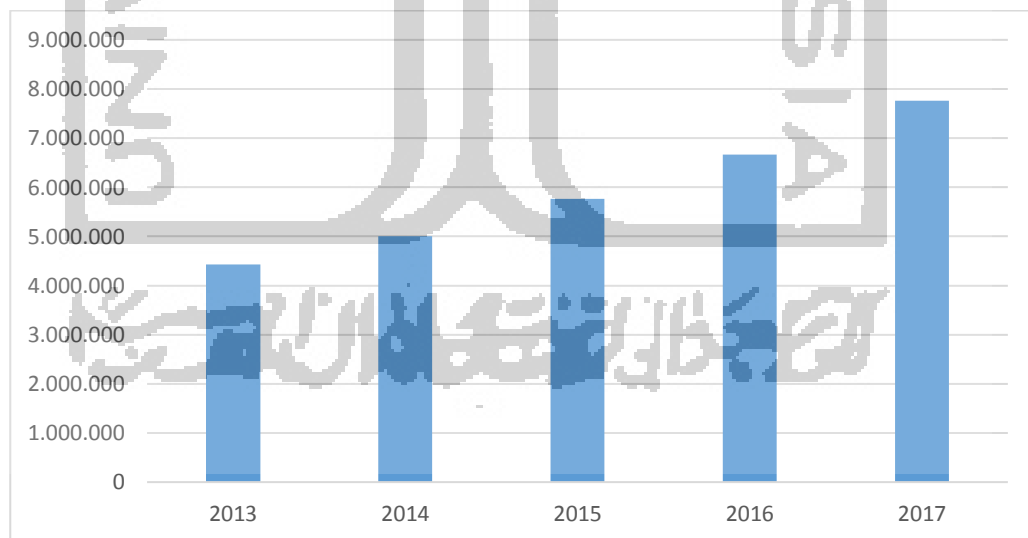
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2018)

**Gambar 1.1 Aset dan Perkembangan Jumlah BPRS 5 tahun terakhir
(Dalam juta rupiah)**

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah BPRS dan aset yang terjadi di Indonesia. Dimana perkembangan jumlah BPRS dari tahun 2013-2015 memiliki jumlah sebanyak 163. Kenaikan aset yang dimiliki oleh BPRS di Indonesia selalu mengalami kenaikan. Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2013 aset yang dimiliki oleh BPRS sebesar Rp 5.833 triliun, pada tahun tahun 2014 dan 2015 aset BPRS mengalami kenaikan dari Rp 6.573 menjadi Rp 7.739 triliun dengan total kantor yang masih sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah BPRS di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 3 buah kantor yang menjadikan total keseluruhan berjumlah 166 kantor. Dan memiliki jumlah aset sebesar Rp 9.157 triliun. Tahun berikutnya, terjadi penambahan kantor yang menjadikan total kantor

sebanyak 167 kantor dengan aset yang dimiliki sebesar Rp 10.840 triliun di tahun 2017.

Fasilitas pembiayaan modal kerja bagi BPRS dari fasilitas pembiayaan likuiditas Bank Indonesia tersebut memberikan kontribusi besar kepada BPRS, terutama untuk memenuhi permintaan pembiayaan usaha modal kerja dari nasabah pengusaha kecil dan mikro sesuai arah dan sasaran yang hendak dicapai. Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BPRS sehingga pendapatan margin bagi hasil menjadi pendapatan utama BPRS, kemampuan menyalurkan pembiayaan oleh perbankan dipengaruhi berbagai faktor sebagaimana dinyatakan oleh Husaeni (2017), dengan meninjau dari sisi internal dan eksternal, dari sisi internal bank terutama di pengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan margin pembiayaan serta memperhatikan rasio-rasio keuangan.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2018)

Gambar 1.2 Penyaluran Pembiayaan di BPRS Tahun 2013-2017

(Dalam juta rupiah)

Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan BPRS setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, jumlah penyaluran pembiayaan sebesar Rp 4.433 Triliun, pada tahun 2014 total penyaluran pembiayaan pada BPRS sebesar Rp 5.004 Triliun, selanjutnya di tahun 2015 mengalami peningkatan kembali yang terjadi di penyaluran pembiayaan di BPRS sebesar Rp 5.765 triliun. Di tahun 2016 terjadi kenaikan kembali sebesar Rp 6.662 Triliun terhadap penyaluran pembiayaan di BPRS. Tahun 2017, penyaluran pembiayaan di BPRS mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp 7.763 Triliun. Pada lima tahun terakhir penyaluran pembiayaan di BPRS selalu mengalami kenaikan, dimana setiap kenaikannya kurang lebih mencapai 1 Triliun setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah yang termasuk di dalamnya BPRS, saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap gencar untuk meningkatkan pangsaanya, salah satunya dari sisi pembiayaan.

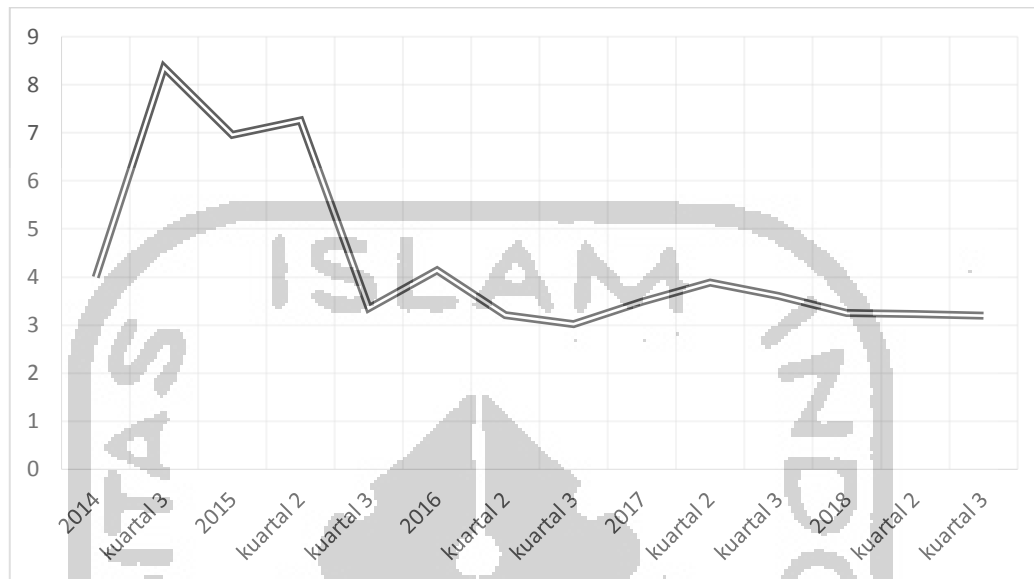
Menurut Husaeni (2017) meningkatnya jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor makro ekonomi maupun kondisi internal BPRS di Indonesia. Dari faktor makro ekonomi terdapat pendapatan asli daerah dan juga inflasi, serta faktor internal bank berupa *credit risk* dapat menjadi faktor jumlah pembiayaan BPRS di Indonesia. Kondisi perekonomian yang selalu menarik perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan adalah tingkat inflasi, karena secara umum inflasi ialah kondisi kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama satu periode tertentu. Menurut Muttaqiena

(2013) inflasi juga dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai tukar perhitungan moneter terhadap suatu komoditas.

Menurut Muttaqiena (2013) inflasi juga menimbulkan beberapa akibat buruk bagi individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Sebagian besar pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja yang mempunyai penghasilan tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah pekerja, oleh sebab itu upah riil pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini mengurangi tingkat kemakmuran segolongan masyarakat Rudiansyah (2014).

Menurut Silvia (2013), inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian. Jika tingkat inflasi rendah dan stabil akan menjadi stimulator pertumbuhan ekonomi. Mankiw (2014) menyebutkan bahwa setiap kali ada gejolak sosial, politik dan ekonomi di dalam maupun di luar negeri masyarakat selalu mengaitkan dengan masalah inflasi. Apabila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu, bahkan bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi bias saja gulung tikar, hal ini biasanya terjadi pada perusahaan kecil.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami fluktuasi tingkat inflasi yang mana berimbas terhadap penyaluran pembiayaan yang di laksanakan oleh BPRS. Inflasi terus terjadi dikarenakan masifnya kegiatan impor terhadap kebutuhan suatu barang yang mengakibatkan kenaikan harga dan pencabutan subsidi secara perlahan.



Sumber : Bank Indonesia (2018)

**Gambar 1.3 Tingkat Inflasi di Indonesia per Kuartal
(Periode Agustus 2014 – Agustus 2018 (%))**

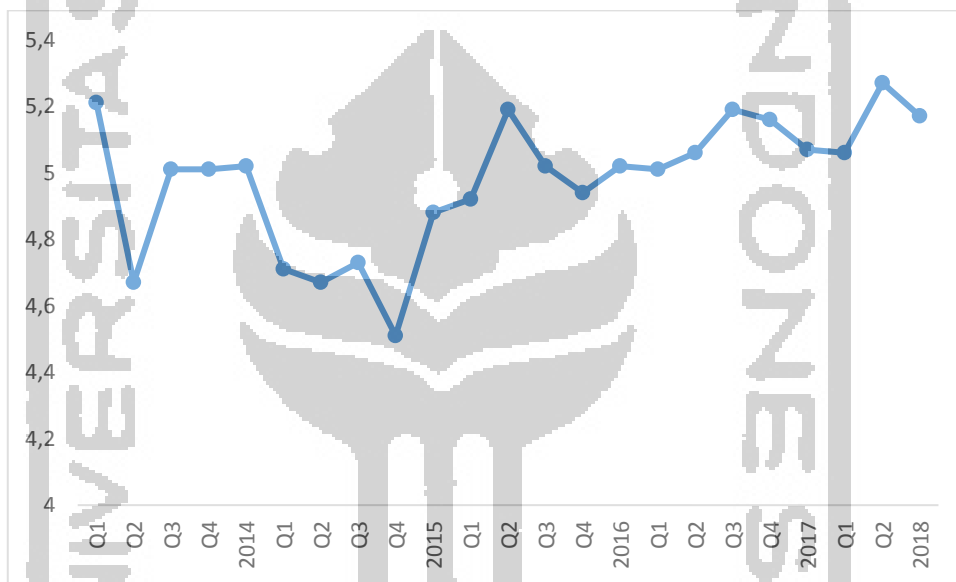
Gambar 1.3 menginformasikan bahwa hasil dari tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018, dimana tingkat inflasi mengalami fluktuatif, kita lihat di tahun 2014 tingkat inflasi yang terjadi sebesar 3,99 %. Namun di tahun 2015 tingkat inflasi mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 7,18 %, di tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat inflasi di Indonesia mengalami penurunan yang lumayan jauh yaitu sebesar 2,79 % dan sebesar 3,82 %,

Menurut Rudiansyah (2014) faktor fluktuatifnya tingkat inflasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh kenaikan harga dan komoditi impor. Selain itu menyatakan juga bahwa dampak yang dialami masyarakat akan menarik dana lebih banyak dari simpanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk simpanan

masyarakat di perbankan syariah. Selanjutnya inflasi mengakibatkan ketidakpastian bagi masyarakat sehingga masyarakat akan mengambil keputusan untuk memindahkan dana-dananya ke aset riil agar nilai kekayaan masyarakat tidak merosot. Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Nuraini (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi.

Ketidakstabilan nilai tukar ini akan mempengaruhi arus modal atau investasi dan perdagangan internasional. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan BPRS di Indonesia. Dengan diperkuat oleh penelitian sebelumnya Rudiansyah (2014) menunjukkan hasil yaitu PDB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia dengan arah koefisien yang positif. Secara teori pendapatan masyarakat yang meningkat akan meningkatkan pula jumlah penyaluran pembiayaan pada bank syariah sebab kelebihan konsumsi mereka akan ditabung untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Pengaruh PAD terhadap pembangunan ekonomi sangat mempunyai peran yang begitu penting. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhannya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD Saragih (2008). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap pembiayaan BPRS bersifat positif.

Faktor yang bisa dilihat dalam mengkaji perkembangan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Dimana pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang (Lutfiyah, 2016).



Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Grafik 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Kuartil Periode 2014-2018

Gambar 1.4 menjelaskan hasil dari pertumbuhan ekonomi dari periode 2014-2018, hasil ini menunjukkan naik turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 %, di tahun selanjutnya mengalami penurunan sekitar 4,88% pada tahun 2015, lalu pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 5,02 %, di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 5,07 %. Di tahun terakhir

penelitian ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan sebesar 5,17 % di tahun 2018. Bisa kita lihat pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya mengalami fluktuasi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widyaningrum (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPRS dengan variabel CAR, NPF, FDR, OER secara simultan berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan penelitian Harianto (2017) menyimpulkan bahwa hanya tingkat efisiensi operasional (BOPO) dan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas di bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu rasio FDR dan rasio CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Selain itu nilai koefisien determinasi yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa masih banyak faktor di luar model yang ada harus dimasukkan. Hal ini agar benar-benar dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas di bank pembiayaan rakyat syariah.

Penelitian lain dilakukan oleh Maryati (2014) menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan produktif (K), aset usaha yang dimiliki UMKM (A), dan jumlah tenaga kerja (L) mempengaruhi nilai produksi usaha UMKM (Y) secara signifikan. Pembiayaan produktif dan aset usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai produksi usaha. Sedangkan, banyaknya tenaga kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai produksi usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memandang bahwa perlu melakukan penelitian lanjutan dengan judul **“PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PEMBIAYAAN BPRS”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap pembiayaan yang dilakukan BPRS periode 2013-2017 ?
- 1.2.2 Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembiayaan yang dilakukan BPRS periode 2013-2017?

1.3 Tujuan penelitian :

- 1.3.1 Mengetahui pengaruh inflasi terhadap pembiayaan yang dilakukan BPRS tahun 2013 - 2017.
- 1.3.2 Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap pembiayaan yang dilakukan BPRS tahun 2013 - 2017

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk penulis, penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang berkualitas untuk bisa dijadikan motivasi bagi penulis apabila hendak melanjutkan penelitian lanjutan. Serta penelitian ini menjadikan evaluasi diri atas apa yang telah dikerjakan.

Bagi BPRS, penelitian ini dapat membantu BPRS menentukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan dari faktor-faktor eksternal untuk melakukan pembiayaan oleh BPRS. Sehingga dalam melakukan pembiayaan, BPRS dapat menangani permasalahan yang akan terjadi, sehingga dapat meningkatkan

profitabilitas BPRS itu sendiri. Penelitian ini dapat membantu BPRS dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi BPRS dengan melihat hasil dari penelitian ini.

Untuk masyarakat luas, penelitian ini dapat menjadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian serupa ataupun untuk mengembangkan variabel baru dan hipotesis baru. Untuk dunia ilmu pengetahuan semoga penelitian ini dapat membantu memahami para masyarakat untuk tidak takut dalam melaksanakan pembiayaan di BPRS.

